

**ANALISIS PERTUMBUHAN POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIFITAS  
PAJAK PENERANGAN JALAN, KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN  
JALAN, TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA  
PALEMBANG TAHUN 2014-2018**



Skripsi Oleh :

**IDA BAGUS PUTU PRIYA JIVANAM**  
**01031381520144**  
**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PALEMBANG**  
**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**ANALISIS PERTUMBUHAN POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN, KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014-  
2018**

Disusun Oleh :

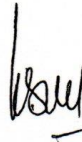
Nama : Ida Bagus Putu Priya Jivanam  
NIM : 01031381520144  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**


**Ketua**



Tanggal: 10/9/19

Arista Hakiki, S.E., M.Acc, Ak  
NIP 197303171997031002

**Anggota**



Tanggal: 19-08-2019

Mcita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA  
NIP 198605132015042002

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

ANALISIS PERTUMBUHAN POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN, KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN, TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014-2018

Disusun Oleh :

Nama : Ida Bagus Putu Priya Jivanam

NIM : 01031381520144

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Desember 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 19 Desember 2019

Ketua,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

Anggota,



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196508161995121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Putu Priya Jivanam

NIM : 01031381520144

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perapajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS PERTUMBUHAN POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN, KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN,  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014-  
2018”**

Pembimbing :

Ketua Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

Anggota Meita Rahmawati, S.E., M.acc., Ak

Tanggal Ujian 19 Desember 2019

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebut sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 19 Desember 2019

Pembuat Pernyataan,

Ida Bagus Putu Priya Jivanam

NIM : 01031381520144

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”**

**“Karena itu hendaknya seseorang bertindak karena kewajiban tanpa terikat terhadap hasil kegiatan, sebab dengan bekerja tanpa ikatan terhadap hasil seseorang sampai kepada yang Mahakuasa”**

***Bhagavad –Gita 3.19***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Ida Shang Hyang Widhi/ Tuhan Yang Maha Esa**
- **Kedua Orang Tuaku yang tercinta**
- **Saudari ku yang tersayang**
- **Sahabat-sahabat seperjuanganku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, para leluhur atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moral dan moril serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq, SE., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E, M.Acc., Ak., CA sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pemikiran, dan saran serta arahan yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Yusnaini, S.E., M.Si., Ak sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj, Rina Tjandrakirana Dp, S.E., M.M., Ak sebagai Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang yang memberikan nasehat serta memberikan arahan untuk dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Asfeni Nurullah, S.E., M.Acc., Ak sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberian arahan, binaan, serta arahan semangat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Meita Rahmawati, S.E, M.Acc., Ak., CA sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah dengan sangat sabar dan banyak membantu penulis, serta bersedia meluangkan banyak waktu, pikiran, memberikan saran dan memberikan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi ini serta tak henti-hentinya memberikan semangat moral selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan menanamkan berbagai ilmu kepada saya selama saya mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah memperlancar proses jalannya perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Ida Kade Damiana dan Ibu Ida Ayu Putu Gayatri Ariwati yang telah melahirkan, membesarkan,

merawat, menjaga, mendidik, memotivasi dan senantiasa mendoakan tiada hentinya serta kasih sayang yang tidak dapat terbayarkan juga tak tergantikan, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Ekonomi.

11. Adik kandung satu-satunya yang tersayang, Ida Ayu Kade Gangga Laksmi yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian juga saran serta doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat seperjuanganku dalam menimba ilmu di UNSRI dari awal perkuliahan sampai sekarang Teguh, Helmi, Barra, Haykal, Hadi, Hadbon, Rivanji, Hafiz, Olak, Vd, Nisak, Dhea, Lilak yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, canda tawa dan kenangan suka maupun duka selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, Terimakasih teman-teman kalian yang terbaik.
13. Pengurus dan Kader KMHDI Sumatera Selatan yang telah selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Jele Melah Nyame Gelah, Bli Dewa Komang, Bli Yamak, Bli Bayu, Eda, Iluh Juli, Dek Novi yang telah memberikan kebersamaan, semangat dan motivasi, serta canda gurau agar segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Nyame.
15. Seluruh tema-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang yang namanya tidak bias penulis sebutkan satu per-satu. Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.
16. Almamaterku sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan.



17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, keluangan waktu, pikiran, dan dukungan selama ini yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam proses dan penyelesaian skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis senantiasa membutuhkan kritik dan saran ataupun masukan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, 1 Agustus 2019

Penulis



Ida Bagus Putu Priya Jivanam

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Ida Bagus Putu Priya Jivanam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Agustus 1997  
Agama : Hindu  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Tanah Merah, Gang Cendana II, No.  
4149 RT 042/ RW 011, Wayhitam, Kec. Ilir  
Barat I, Kel. Demang Lebar Daun, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan  
Alamat E-mail : ibjivanam@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Baptis Palembang  
SMP : SMP Xaverius 01 Palembang  
SMA : SMA Xaverius 01 Palembang  
S-1 : Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi  
Jurusan Akuntansi



## ABSTRAK

### ANALISIS PERTUMBUHAN POTENSI PENERIMAAN, EFEKTIFITAS PAJAK PENERANGAN JALAN, KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014-2018

Oleh:  
Ida Bagus Putu Priya Jivanam

Tolak ukur pemerintah daerah berhasil menjalankan otonomi daerahnya adalah kemampuan keuangan daerahnya, salah satunya adalah sumber penerimaan. Pajak penerangan jalan merupakan sektor pajak daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dimana kebutuhan penggunaan akan tenaga listrik semakin besar adalah modal utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan kegiatan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan potensi penerimaan, tingkat efektifitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan potensi penerimaan pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 10%. Tingkat efektifitas pajak penerangan jalan terdiri atas pajak penerangan jalan yang dihasilkan PLN sebesar 104,82% yang tergolong sangat efektif, sedangkan non PLN sebesar 115,75% masih tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang masih tergolong kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang agar sumber penerimaan pajak daerah semakin baik.

*Kata kunci : pertumbuhan, efektifitas, kontribusi, pajak penerangan jalan, pendapatan asli daerah.*

Ketua,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

**ABSTRACT**

**GROWTH ANALYSIS OF POTENTIAL REVENUE, EFFECTIVENESS OF STREET LIGHTING TAX, CONTRIBUTION OF STREET LIGHTING TAX TO THE ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE OF PALEMBANG CITY IN THE YEAR OF 2014-2018**

By:

Ida Bagus Putu Priya Jivanam

*The benchmarks of local government successfully carrying out regional autonomy is the ability of its regional finances, the source of revenue is one of them. Street lighting tax is a regional tax sector that has the potential to increase Palembang's Original Local Government Revenue where the need of electricity increases as the main capital in meeting daily needs such as economic activity needs. This study aimed to analyze the growth of potential revenue, the level of effectiveness, and the contribution of street lighting tax to the Original Local Government Revenue of Palembang City in the year of 2014-2018. The data analysis method used in this research was descriptive method with quantitative approach. The results showed that the growth rate of potential street lighting tax revenue by an average of 10%. The level of effectiveness of street lighting tax consists of street lighting tax produced by PLN was 104.82% which is classified as very effective, while non-PLN was 115.75% which is still classified as very effective. The contribution of the street lighting tax to Palembang's Original Local Government Revenue is still lacking. This shows that there is a need to improve the management by the Departement of Regional Tax of Palembang so that the source of regional tax revenue will be better.*

*Keywords: growth, effectiveness, contribution, street lighting tax, original local government revenue*

Ketua,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ida Bagus Putu Priya Jivanam  
NIM : 01031381520144  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan  
Judul : Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018

Telah kami periksa cara penulisan, Grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Dosen pembimbing Skripsi:

Palembang, Desember 2019

Ketua,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M.acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR PERSAMAAN .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian. ....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1 Dasar Hukum Pendapatan Daerah.....	13
2.1.2. Sumber Keungan Daerah.....	13

2.1.3. Pajak.....	14
2.1.3.1. Pengertian Pajak.....	14
2.1.3.2. Aspek Ekonomi Dari Perpajakan.....	15
2.1.3.3. Fungsi Pajak.....	15
2.1.3.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	16
2.1.3.5. Macam-Macam Pajak.....	17
2.1.4. Pajak Daerah.....	18
2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah.....	18
2.1.4.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	19
2.1.4.3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	19
2.1.5. Pajak Penerangan Jalan.....	21
2.1.5.1. Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan Pajak.....	23
2.1.5.2. Pengecualian dan Pembebasan Pajak .....	25
2.1.5.3. Tata Cara Perhitungan Penetapan pajak .....	26
2.1.5.4. Tata Cara Pembayaran dan penagihan Pajak .....	27
2.1.5.5. Keberatan dan Banding .....	28
2.1.5.6. Sanksi dan pengawasan Administrasi .....	28
2.1.6. Pertumbuhan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	29
2.1.7. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....	30
2.1.8. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan .....	30
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
2.3. Kerangka Pemikiran .....	33



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
3.2. Jenis Data .....	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Teknik Analisis Data.....	37
3.4.1. Analisis Pertumbuhan Potensi pajak penerangan jalan .....	38
3.4.2. Analisa Efektifitas Pajak Penerangan Jalan .....	38
3.4.3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan .....	39

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Kota Palembang.....	41
4.2. Profil Penerangan Jalan .....	42
4.3. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang .....	44
4.3.1. Sejarah Badan Pengelolaan pajak Daerah Kota Palembang .....	44
4.3.2. Visi dan misi badan pengelolaan Pajak Daerah Palembang .....	45
4.3.3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	46
4.4. Analisis Data	
4.4.1. Perhitungan Pertumbuhan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	54
4.4.2. Perhitungan Efektifitas Pajak Penerangan jalan .....	57
4.4.3. Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan asli daerah.....	62
4.5. Interpretasi Hasil.....	65



4.5.1. Pertumbuhan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	65
4.5.2. Efektifitas pajak penerangan jalan .....	67
4.5.3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 2014-2018.....	72
4.6. Faktor-faktor Yang mempengaruhi pajak penerangan jalan menjadi efektif atau Tidak Efektif atau tidak efektif .....	74
4.7. Faktor-Faktor yang menghambat menentukan potensi penerimaan pajak penerangan jalan dikota Palembang tahun 2014-2018 .....	76

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	78
5.2. Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2013.....	5
Tabel 1.2 Kontribusi Penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2017.....	6
Tabel 1.3 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Kategori Pelanggan Kota Palembang....	7
Tabel 1.4 Jumlah KWh Berdasarkan Kategori Pelanggan di Kota Palembang .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Lampu dan Tiang Penerangan Jalan Kota Palembang Tahun 2014-2018.....	43
Tabel 4.2 Realisasi Rekening Listrik Lampu Jalan Dinas PJPP Kota Palembang.....	44
Tabel 4.3 Pertumbuhan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Tahun 2014-2018 .....	66
Tabel 4.4 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan PLN Kota Palembang Tahun 2014-2018.....	68
Tabel 4.5 Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kota Palembang Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	53
Gambar 4.2 Tingkat Pertumbuhan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Tahun 2014-2018 .....	66
Gambar 4.3 Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan yang Berasal dari PLN Kota Palembang Tahun 2014-2018 .....	69
Gambar 4.4 Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan yang Berasal dari Non PLN Kota Palembang Tahun 2014-2018 .....	71
Gambar 4.5 Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018.....	73

## DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan I Rasio Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan .....	38
Persamaan II Efektifitas Pemungut Pajak .....	39
Persamaan III Kontribusi Pajak Penerangan Jalan .....	40
Persamaan IV Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan .....	54
Persamaan V Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....	57
Persamaan VI Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar surat-surat izin penelitian
- Lampiran 2 Daftar Hasil Wawancara kepada Pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
- Lampiran 3 Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2018
- Lampiran 4 Laporan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Yang Disetor Oleh PLN Tahun 2014-2018
- Lampiran 5 Laporan Kenaikan Pengguna Listrik dan KWh berdasarkan Kategori Pelanggan Listrik PLN
- Lampiran 6 Realisasi Rekening Listrik Lampu Jalan Dinas PJPP Kota Palembang Tahun 2014-2018

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana komponen seperti pemerintah daerah dan komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada, untuk membentuk suatu pola kemitraan dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Kuncoro, 2015). Pembangunan ekonomi daerah mempunyai titik puncak khususnya di Daerah Tingkat II (Kota/ Kabupaten) dalam awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah dapat mengetahui dan mengelola potensi yang terdapat di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Daerah diberikan wewenang untuk turut serta dalam pembangunan nasional sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan hak mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah harus bisa menjamin berjalannya rumah tangga dengan baik atau yang lebih dikenal dengan sistem desentralisasi. Harapan daerah dalam melakukan hal ini tentunya tidak lain adalah untuk mengurus dan membiayai pembangunan daerahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Penerapan dari sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk dalam sistem pemerintahan daerah (Azhari, 2016). Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut untuk memiliki kemandirian dari sektor fiskal karena bantuan berupa subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai sumber pokok dalam APBD dirasa mulai kurang dukungannya dan menjadi sumber utamanya adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Tolak ukur pemerintah daerah berhasil menjalankan otonomi daerahnya adalah kemampuan keuangan daerahnya. Daerah otonom harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri, disamping itu untuk meminimalisir ketergantungan bantuan pada pemerintah pusat. Artinya, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar pemerintah daerah

yang didukung oleh kebijakan pembagian sumber keuangan pusat dan daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan negara.

Otonomi daerah yang diterapkan sejatinya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan dalam dapur rumah tangganya sendiri. Tujuannya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik sehingga dapat mengelola tatanan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa pos antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar lebih potensial penerimaannya adalah melalui pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang luas dalam memungut pajak daerahnya yang diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah sejatinya harus memiliki kekuatan yang bersumber dari penarikan pungutan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian pajaknya dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memberikan keluwesan untuk dapat menggali potensi serta meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah.



Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti Undang-Undang No. 34 Tahun 2000) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak tersebut adalah perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh negara (Azhari, 2016).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran keperluan rumah tangga daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat otonom. Pengeluaran-pengeluaran seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, membiayai administrasi pemerintah, serta membiayai kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik (Azhari, 2016).

Palembang merupakan ibukota provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang adalah jantung perekonomian provinsi Sumatera Selatan, seluruh kegiatan perekonomian berpusat di Kota Palembang. Hal itu membuat Kota Palembang menjadi objek yang sangat potensial dalam melakukan pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dalam urusan pembiayaan daerah

tersebut. Pajak daerah Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2010-2013 (Rp)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>
2010	104.047.313.437	65.175.505.023	23.533.118.892	62.437.716.891
2011	207.746.349.410	81.710.682.296	35.184.073.541	48.336.936.669
2012	333.104.821.406	106.509.830.739	27.403.396.984	54.859.405.388
2013	357.230.028.259	118.616.385.724	24.824.227.739	188.432.962.370

*Sumber: BPPD Kota Palembang (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak daerah seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan yang signifikan, sebenarnya angka tersebut masih dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi, dan eksistensifikasi pajak daerah yang mendukung kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut terutama di Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, dalam menyokong pembangunan itu sendiri.

**Tabel 1.2 Kontribusi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2017 (Rp)**

<b>Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Pajak Hotel	38.869.545.560	43.539.617.438	52.346.963.653	57.255.225.469
Pajak Restoran	45.527.716.420	57.718.132.607	70.544.503.680	79.348.336.478
Pajak Hiburan	10.846.608.407	12.608.936.834	16.940.474.310	22.228.414.984
Pajak Reklame	14.185.516.850	15.318.876.606	16.567.211.469	18.113.700.816
Pajak Penerangan Jalan PLN	115.097.485.083	134.093.161.585	138.836.706.156	154.822.143.719
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	4.095.070.814	4.508.080.811	5.786.841.229	5.772.368.641
Pajak Parkir	18.102.433.974	21.117.176.973	24.783.105.599	28.018.461.348
Pajak Air Bawah Tanah	9.549.000	10.300.905	22.553.728	51.361.311
Pajak Sarang Burung Walet	26.400.000	64.109.000	68.450.001	77.849.880
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	276.239.933	652.114.844	691.787.625	807.044.703
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	83.810.426.995	97.443.811.213	117.558.226.402	166.521.800.165
Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan	132.727.606.144	92.038.580.407	92.405.857.197	146.996.045.395

*Sumber: BPPD Kota Palembang (Data Diolah)*

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa diantara klasifikasi yang terdapat dalam sumber penerimaan pajak daerah, salah satunya yang memberikan sumber penerimaan yang cukup besar adalah terletak pada sektor Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan oleh PLN dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan. Pajak Penerangan Jalan tidak hanya dari PLN namun juga berasal dari non PLN. Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan PLN tahun 2014-2015 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp 18.995.676.502,-. Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp 4.743.544.571,-. Tahun 2016-2017 mengalami kenaikan penerimaan

sebesar Rp 15.985.437.563,-. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan non PLN setiap tahunnya dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Tahun 2014-2015 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp 413.009.997,-. Tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar Rp1.278.760.418,-. Tahun 2016-2017 mengalami penurunan atau defisit sebesar Rp 14.472.588,-. Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

**Tabel 1.3 Jumlah Pelanggan berdasarkan Kategori Pelanggan di Kota Palembang**

<b>Kategori</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
Rumah Tangga	1.191.649	1.288.557	1.375.845	1.478.999	1.575.664
Bisnis	84.559	88.405	91.058	94.705	97.354
Industri	794	847	907	958	1.015
Pemerintah	7.064	7.786	8.307	8.936	10.043
Sosial	14.626	15.374	16.175	17.171	18.075
Lain-lain	139	-	-	206	234

*Sumber: PT PLN Persero (Data Diolah)*

Pada tabel 1.3 terdapat jumlah pelanggan berdasarkan kategori pelanggan yang terdiri atas kategori, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, sosial dan lain-lain. Pada kategori rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah dan sosial pada tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Pada kategori lain-lain dari tahun 2014-2016 tetap atau tidak mengalami perubahan, sedangkan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 28. Jumlah pelanggan berdasarkan kategori mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya kenaikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan yang dihasilkan oleh PLN.

**Tabel 1.4 Jumlah KWH berdasarkan Kategori Pelanggan di Kota Palembang (KWH)**

<b>Kategori</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
Rumah Tangga	243.816.386	260.889.584	256.637.359	266.880.880	278.517.394
Bisnis	109.341.004	118.472.204	118.614.640	127.859.531	137.064.382
Industri	78.518.569	92.022.812	101.948.811	106.422.215	97.328.455
Pemerintah	22.349.140	24.987.695	23.108.894	26.018.335	28.482.179
Sosial	19.663.286	21.614.988	22.155.606	24.156.034	26.082.951
Lain-lain	1.203.641	274.373	399.141	536.271	11.531.309

*Sumber: PT PLN Persero (Data Diolah)*

Pada tabel 1.4 terdapat jumlah KWh berdasarkan kategori pelanggan yang terdiri atas kategori rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, sosial, dan lain-lain. Pada kategori rumah tangga tahun 2014-2015 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan dan diikuti pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan. Pada kategori bisnis, sosial, dan lain-lain mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2014-2018. Pada kategori pemerintah mengalami kenaikan dan penurunan terbukti pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2016-2018 terus mengalami kenaikan.

Adanya perubahan kebutuhan yang semakin meningkat membuat penerimaan Pajak Penerangan Jalan semakin besar pula penerimaannya, hal itu dikarenakan kenaikan jumlah pendapatan penjualan pemakaian listrik yang diterima PLN semakin besar dan tentunya pajak yang dibayarkan oleh PLN ke pemungut pajak semakin besar pula ditambah dengan perhitungan tarif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Adanya fenomena ini menunjukkan perlunya analisis mengenai Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan oleh PLN dan non

PLN telah berupaya dalam menyumbangkan penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dimaksudkan agar dapat menggali lebih dalam potensi Pajak Penerangan Jalan yang diterima agar nantinya penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya demi keamanan, ketertiban serta menambah unsur estetika tata kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada tahun 2014-2018?.
2. Bagaimana efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada tahun 2014-2018?.
3. Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada tahun 2014-2018?.
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan efektif dan tidak efektif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertumbuhan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada tahun 2014-2018.
2. Untuk menganalisis efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang pada tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang pada tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan efektif dan tidak efektif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pajak daerah terutama pada Pajak Penerangan Jalan, dalam hal ini difokuskan untuk mengetahui laju pertumbuhan potensi Pajak Penerangan Jalan, efektifitas dari Pajak Penerangan Jalan, dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat Kota Palembang mengenai pungutan yang berasal

dari Pajak Penerangan Jalan dalam menyumbangkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi para pembaca dengan berdasarkan teori yang ada dalam melakukan penelitian selanjutnya yang tentunya berkaitan dengan topik ini.

### 4. Bagi Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dan PT PLN sebagai perusahaan penyedia jasa listrik. Penelitian ini diharapkan nantinya menjadi evaluasi lebih mendalam sejauh mana Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang telah efektif atau belum dan dapat menambah masukan-masukan dengan melihat data-data yang telah ada.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dengan judul Analisis Pertumbuhan Potensi Penerimaan, Efektifitas Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018 yang tersusun dalam lima bab atau bagian, dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang telah digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN**



Pada bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengurai teori-teori dan konsep umum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai tahapan-tahapan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang mendukung judul penelitian ini dan penjelasan mengenai bagaimana hasil analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara terhadap pihak terkait. Melalui analisis tersebut, maka akan diperoleh suatu hasil yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pemerintah Kota Palembang selaku pembuat kebijakan, masyarakat, dan peneliti selanjutnya yang mempunyai kepentingan dalam penelitian ini agar lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, (2014). Analisa Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. *Jurnal Akuntansi Unesa, Vol 3 No. 1*.
- Bawazier, Fuad. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 1: 1-12*
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, Sri. (2013). Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah. Vol 1*.
- Harun, Hamrolie. (2013). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Indrakusuma. 2011. "Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang". *Jurnal. Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/2904/> (diakses 22 Febuari 2019).
- Kuncoro, Mudrajad. (2015). *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi
- Mongonsidi, Riedel. (2013). Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi, Vol 1 No. 4*
- Nugraha, Arif. (2015). "Analisa Potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kota Bandung Tahun 2007-2011". *Jurnal. Universitas Pendidikan Indonesia*. <http://www.researchgate.net/publication/298397202> (diakses 22 Febuari 2019).
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Walikota Palembang No. 20 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*.
- Samudra, Azhari. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Diana. 2012. "Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas, dan Tax Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal. Universitas Widyatama*. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2313> (diakses 22 Febuari 2019).
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suandy, Erly. (2016). *Edisi 6. Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiarti, Arieyani. 2011. "Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/29049/> (diakses 22 Febuari 2019).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Profil Kota Palembang Tahun 2018 <https://www.bps.palembang.go.id> (diakses tanggal 10 Juli 2019).
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 2019. Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Sumatera Selatan.
- Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. 2019. Daftar Realisasi Rekening Listrik Lampu Jalan Dinas PJPP Kota Palembang Tahun 2014-2018. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Palembang. Sumatera Selatan.
- PLN. 2019. Daftar Laporan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang yang Disetor Tahun 2014-2018. Kota Palembang. Sumatera Selatan.